

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi sektor publik sering dikaitkan dengan pemerintah yang bertanggungjawab memberikan pelayanan publik untuk memenuhi kesejahteraan di berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, keamanan, kebebasan beragama dan beberapa hal lainnya. Dalam praktiknya organisasi sektor publik di Indonesia kini diwarnai dengan munculnya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi sektor publik tersebut, baik pusat maupun daerah. Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dapat diwujudkan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan, (Ariyani, 2018). Laporan keuangan pemerintah yang disusun sesuai dengan standar akuntansi dan didukung oleh sebuah sistem akuntansi yang andal, maka akan meningkatkan kualitas dari laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006, laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara atau daerah dalam suatu periode. Dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, suatu laporan keuangan harus memenuhi kriteria yang memadai yaitu relevan, dapat diandalkan, dapat dinilai atau dibandingkan, dan dapat dipahami. Dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 disebutkan bahwa laporan keuangan

merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Menurut Tawaqal dan Suparno (2017) laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) terdiri atas 7 (tujuh) komponen, yaitu: neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan dijadikan sebagai media oleh pemerintah untuk mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada publik. Selain itu juga berfungsi untuk memberikan informasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja, maka dari itu informasi yang disajikan harus memiliki nilai, agar informasi keuangan tersebut dapat bermanfaat bagi para penggunanya. Berlandaskan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dijelaskan bahwa pihak-pihak pemakai laporan keuangan ini ada beberapa yakni masyarakat, wakil rakyat, dewan pengawas, dewan pemeriksa, pemerintah dan badan politik.

Laporan keuangan yang memiliki nilai dan bermanfaat bagi penggunanya menandakan bahwa laporan keuangan tersebut berkualitas. Para pengguna informasi laporan keuangan akan mampu mengambil keputusan dengan baik, karena didasarkan pada informasi yang telah dipersiapkan dengan baik, disetujui, diaudit secara transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan dan berkualitas. Kualitas laporan keuangan menggambarkan sejauh mana suatu laporan keuangan menyajikan informasi dengan benar dan jujur. Hal ini berarti bahwa kualitas informasi dalam

laporan keuangan akan memberikan gambaran kondisi suatu pemerintahan dalam mewujudkan akuntabilitas keuangannya.

Kawedar dalam Juniarta dan Asana (2020) menyatakan bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah maka diperlukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK RI dalam menilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dijelaskan dengan empat jenis opini yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) dan Tidak Wajar (TW) (Setiawan dan Gayatri, 2017). Opini WTP merupakan yang paling baik dari keempat jenis opini tersebut, karena WTP memiliki arti bahwa laporan keuangan sudah baik dan disajikan secara wajar sesuai pedoman yang berlaku yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pemberian pendapat atau opini terkait kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tujuan dari adanya pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan tersebut. Kriteria dalam pemberian opini yakni: 1) kesesuaian dengan SAP, 2) kecukupan pengungkapan, 3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan 4) efektivitas sistem pengendalian internal (SPI).

Fakta yang terjadi di lapangan terkait dengan kualitas laporan keuangan pemerintah sangat perlu untuk dikaji kembali. Hal tersebut dikarenakan masih adanya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang belum mampu memperoleh opini WTP dari BPK. Pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) semester I Tahun 2021, memuat hasil pemeriksaan atas 541 (99%) LKPD Tahun 2020 dari 542 pemerintah daerah

yang wajib menyusun laporan keuangan Tahun 2020, (bpk.go.id, 2020). Dimana terdapat 1 (satu) pemerintah daerah yang belum menyampaikan laporan keuangan kepada BPK, yaitu Pemerintah Kabupaten Waropen di Provinsi Papua, (bpk.go.id, 2021). Berdasarkan IHPS Semester I Tahun 2021, BPK telah memberikan opini terhadap 541 LKPD untuk Tahun 2020, yang diantaranya yaitu 486 opini WTP (90%), 49 opini WDP (9%), 4 opini TMP (0,7%), dan 2 opini TW (0,3%), (bpk.go.id, 2021). BPK Perwakilan Provinsi Bali telah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2020 kepada 9 pemerintah kabupaten/kota se-Bali, (Tribun-Bali.com, 2021). Berdasarkan hasil pemeriksaan, opini BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2020 pada Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Tabanan adalah WTP, (Tribun-Bali.com, 2021).

Terkait dengan hal tersebut, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Kota dan Kabupaten di wilayah Provinsi Bali. Permasalahan yang ditemukan diantaranya mengenai penatausahaan atas pendapatan daerah yang belum memadai, sehingga mengakibatkan masih terdapat potensi pendapatan daerah yang belum optimal dan kekurangan penetapan pajak daerah. Selain itu, pihaknya menemukan bahwa penatausahaan dana hibah pariwisata tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan masih terdapat penerima bantuan yang tidak memenuhi syarat atau menerima dana hibah tidak sesuai dengan

besaran yang seharusnya. Ditemukan pula kesalahan penganggaran atas realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal, sehingga mengakibatkan realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal lebih saji atau kurang saji dari nilai yang seharusnya. Kemudian, realisasi belanja premi asuransi kesehatan penerima bantuan iuran (PBI) tidak didukung dengan data yang valid (seperti, tidak dilengkapi NIK, telah meninggal dunia dan tidak terdaftar), sehingga mengakibatkan pembayaran iuran PBI membebani anggaran. Selain itu, pengelolaan dan penatausahaan asset tetap yang belum tertib mengakibatkan penyajian saldo aset tetap belum mencerminkan informasi yang sebenarnya, (Tribun-Bali.com, 2021).

Kabupaten Gianyar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang mendapatkan opini WTP dari BPK. Dimana sebelumnya Pemerintah Kabupaten Gianyar pada tahun 2009-2013 BPK RI memberikan opini WDP dalam penyajian LKPD Kabupaten Gianyar, (bpk.go.id, 2014). Namun dari tahun 2014-2020 pemerintah Kabupaten Gianyar telah berhasil mendapatkan opini WTP tujuh kali berturut-turut dari BPK RI. Meskipun pemerintah Kabupaten Gianyar telah mendapatkan opini WTP, namun dari pelaksanaan pemeriksaan di lapangan BPK masih menemukan beberapa kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Meskipun telah memperoleh opini WTP dari BPK di sisi lain perlu adanya perbaikan dan peningkatan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Opini BPK merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh para pemakai kepentingan (*stakeholders*)

untuk mendapatkan tingkat kepercayaan atas sebuah laporan keuangan yang disajikan, (Ayu dan Kusumawati, 2020).

Permasalahan tersebut umumnya dapat terjadi karena belum optimalnya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh aparat yang berwenang, belum maksimalnya sumber daya manusia (SDM) dalam mengerti akuntansi, sistem aplikasi pencatatan dan penyampaian informasi yang dipergunakan pemerintah belum dimutakhirkan dan masih memuat kekurangan serta rasa memiliki atau komitmen pegawai terhadap organisasi masih kurang. Masalah-masalah tersebut akan berdampak pada kualitas informasi dan proses pelaporan keuangan.

Dalam pembuatan dan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas, pegawai atau aparatur bagian keuangan harus memahami aturan penyusunan laporan keuangan yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) diibaratkan sebagai suatu proses untuk memahami dan mengerti benar tentang prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan berpedoman pada SAP akan memudahkan aparatur bagian keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Semakin baik pemahaman pegawai bagian keuangan akan SAP, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanaffi (2017), Sihasale (2018), Yaqin dan Jatmiko (2018), Rohman, dkk (2020) dan Puspita, dkk (2020) yang menunjukkan bahwa pemahaman SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan menurut Artana (2016)

menyatakan bahwa pemahaman SAP tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Selain pemahaman SAP, pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) juga merupakan faktor penting untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) diibaratkan dengan penggunaan sistem pengolahan data akuntansi yang merupakan koordinasi dari manusia, alat dan metode dalam suatu wadah organisasi yang terstruktur untuk menghasilkan informasi akuntansi keuangan dan informasi manajemen berkualitas. SIA dirancang untuk menghasilkan informasi berupa informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak internal lembaga/instansi maupun pihak eksternal. SIA pada dasarnya dikaitkan dengan keterlibatan komputer dalam menangani tugas-tugas dan memiliki peran yang sangat besar dalam menunjang kelancaran sebuah sistem, sehingga informasi sangat dibutuhkan pihak manajemen dapat disajikan dengan cepat dan tepat waktu. Semakin baik pemanfaatan SIA suatu instansi maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin baik pula. Hal ini dibuktikan oleh Saipullah (2017), Sihasale (2018) dan Ariyani (2018) yang menyatakan bahwa pemanfaatan SIA berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yanti (2020) memberikan hasil yang berbeda yaitu pemanfaatan SIA tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Sistem Pengendalian Internal (SPI). Sistem Pengendalian Internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran

dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan kegiatannya pemerintah daerah harus membangun dan memiliki sistem pengendalian internal yang baik, dengan begitu akan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Bukti empiris mengenai pengaruh SPI terhadap kualitas laporan keuangan yang dilakukan oleh Saipullah (2017), Yaqin dan Jatmiko (2018), Rohman, dkk (2020) dan Puspita, dkk (2020) menemukan bahwa SPI berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Septarini dan Papilaya (2016) membuktikan bahwa SPI tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Kompetensi sumber daya manusia menjadi salah satu faktor lainnya yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan yang menyatakan kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga pegawai negeri sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Pegawai dengan SDM yang berkompeten akan mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, sehingga laporan keuangan selesai tepat waktu dan berkualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Bukti empiris mengenai pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan telah dilakukan oleh Hanaffi (2017), Yaqin dan Jatmiko (2018) dan Nuraini

(2019) menyatakan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan Siwambudi, dkk (2017) menyatakan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Hal lain yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas yaitu komitmen organisasi. Komitmen organisasi menunjukkan keinginan seseorang untuk bertahan dalam organisasi serta ikut terlibat dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi sehingga akan berusaha menciptakan kinerja yang baik. Semakin tinggi komitmen pegawai terhadap organisasi, maka akan memudahkan pekerjaan yang tersulit sekalipun sehingga kualitas laporan keuangannya akan baik. Hal ini sejalan dengan penelitian Nuraini (2019) dan Rohman, dkk (2020) yang menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hernanda dan Setiyawati (2020) menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian fenomena di atas dan adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya yang sudah dijelaskan, maka peneliti mencoba menguji kembali dengan mengambil judul **“Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan” (Studi Empiris pada OPD Kabupaten Gianyar).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kabupaten Gianyar?
2. Apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kabupaten Gianyar?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kabupaten Gianyar?
4. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kabupaten Gianyar?
5. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kabupaten Gianyar?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kabupaten Gianyar.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kabupaten Gianyar.
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kabupaten Gianyar.
4. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kabupaten Gianyar.
5. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kabupaten Gianyar.

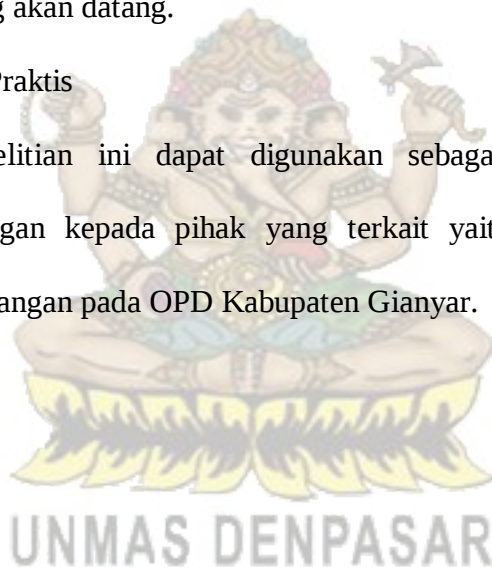
1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu akuntansi, khususnya kualitas laporan keuangan yang berhubungan dengan pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia dan komitmen organisasi serta menjadi bahan referensi untuk mengadakan penelitian di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan kepada pihak yang terkait yaitu bagian akuntansi/tata usaha keuangan pada OPD Kabupaten Gianyar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LandasanTeori

2.1.1 *Stewardship Theory*

Stewardship theory (Donaldson dan Davis, 1991), menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. *Stewardship theory* atau disebut juga teori pengabdian atau pelayanan merupakan teori yang didasarkan pada asas kepercayaan pada pihak yang diberikan wewenang, dimana manajemen dalam suatu organisasi dicerminkan sebagai *good steward* yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya secara penuh tanggung jawab, (Fajar & Rohman, 2012).

Menurut Murwaningsari (2009) asumsi filosofi mengenai teori *stewardship* dibangun berdasarkan sifat manusia yaitu dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, serta dapat berlaku jujur untuk pihak lainnya. Pemerintah daerah diibaratkan sebagai *stewards* atau penerima amanah yang mempunyai kewajiban untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi organisasi dan para pemakai informasi keuangan pemerintah. *Stewardship theory* merupakan teori yang dirancang untuk bertindak sesuai dengan keinginan *principal* dan berusaha untuk mencapai sasaran organisasi dengan tidak akan meninggalkan organisasinya (Sihasale, 2018).

Manajemen pemerintah yang berperan sebagai *steward* atau pihak yang dipercaya akan bertindak dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan publik (*principal*) karena dianggap mampu dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan *principal* (para pengambil keputusan). Aparatur pemerintah yang dicerminkan sebagai *good steward* akan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas yang dapat digunakan oleh *principal* untuk membuat keputusan yang rasional (Khairudin, 2017).

Menurut para ahli, teori ini menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang menjadi penghubung antara *steward* dengan *principal*. Sesuai dengan hal tersebut dalam pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan data informasi akuntansi secara jelas dan rinci agar bermanfaat dan relevan bagi berbagai pihak yang membutuhkan informasi laporan keuangan tersebut.

Dengan demikian fungsi dari *stewardship theory* itu sendiri adalah untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat ataupun pemerintah pusat dalam pengelolaan dana yang diberikan agar digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Putri, 2019). Pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab atas kepercayaan dari *principal* dan kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan kondisi keuangannya dalam bentuk laporan keuangan yang berkualitas.

Selain itu implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan mengenai bagaimana eksistensi pemerintah daerah sebagai lembaga yang jujur dan dapat dipercaya dalam mewadahi keluhan masyarakat, memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat, mampu mempertanggungjawabkan keuangan yang diamanahkan dan kebutuhan dapat terpenuhi secara maksimal, sehingga kesejahteraan publik dapat tercapai. Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, maka *stewards* mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam penyusunan laporan keuangan. Didukung dengan pemahaman aparaturnya akan standar akuntansi pemerintah (SAP), pemanfaatan sistem informasi akuntansi (SIA) dalam organisasi, pengawasan dan pengendalian internal terhadap organisasi maka akan mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan kepuasan organisasi dapat dicapai. Selain itu juga didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan serta rasa memiliki atau komitmen terhadap organisasi.

2.1.2 Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah

Definisi pemahaman menurut KBBI adalah pengertian, pengetahuan banyak dan kurang, pendapat, pandangan, mengerti benar, tahu benar, pandai dan mengerti benar (tentang suatu hal). Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (PP No. 71 Tahun 2010). Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan

suatu proses untuk mengerti benar tentang prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

SAP menjelaskan secara jelas mengenai prosedur dan aturan yang harus diperhatikan dalam menyusun laporan keuangan terkait pencatatan setiap transaksi dan pengungkapan laporan keuangan. Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan, (Mahmudi, 2018). Standar akuntansi menjadi kriteria audit bagi auditor sebagai dasar untuk menilai apakah laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, (Mahmudi, 2018). Laporan keuangan yang berpedoman dengan SAP diyakini dapat memberikan informasi keuangan yang relevan dan andal (Rafid, 2016).

SAP tersebut dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Standar akuntansi pemerintahan dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif, (Hanaffi, 2017). Selain itu SAP juga dilengkapi dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 Standar Akuntansi, PSAP terdiri dari:

- a) PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan
- b) PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran berbasis Kas. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah dalam periode mendatang.
- c) PSAP No. 03 Laporan Arus Kas. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transtoris.

- d) PSAP No. 04 Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.
- e) PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- f) PSAP No. 06 Akuntansi Investasi. Suatu pengeluaran kas atau aktiva dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria yaitu kemungkinan manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dan nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai
- g) PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap. Akuntansi Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, dan konstruksi dalam pengerjaan
- h) PSAP No. 08 Akuntansi Kontruksi dalam pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan, dan mesin, gedung dan bangunan,

jalan, irigasi, jaringan, serta aset tetap lain yang proses pemerolehannya/ pembangunannya membutuhkan waktu tertentu, dan belum selesai.

- i) PSAP No. 09 Akuntansi Kewajiban. Suatu kewajiban yang diakui besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- j) PSAP No. 10 Koreksi kesalahan. Koreksi adalah tindakan pembetulan agar pos-pos yang tersaji sesuai dengan seharusnya.
- k) PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasian. Laporan Keuangan Konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAI, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan
- l) PSAP No. 12 Laporan Operasional. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Pemahaman terhadap SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu orang yang bertugas untuk menyajikan laporan keuangan suatu instansi haruslah paham tentang aturan ataupun standar pelaporan keuangan yang berlaku sehingga laporan keuangan yang dibuat berkualitas dan sesuai dengan standar yang berlaku.

2.1.3 Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pemanfaatan adalah proses, cara, perbuatan memanfaatkan. Pemanfaatan juga sering disebut dengan penerapan atau penggunaan. Menurut Susanto (2017), menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi (SIA) merupakan suatu sistem pengolahan data akuntansi yang merupakan koordinasi dari manusia, alat dan metode yang berinteraksi secara harmonis dalam suatu wadah organisasi yang terstruktur untuk menghasilkan informasi akuntansi keuangan dan informasi manajemen yang berstruktur pula. Sistem informasi akuntansi memiliki peran penting dalam pengendalian keputusan.

Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan proses memanfaatkan atau penerapan sistem pengolahan data akuntansi yang merupakan koordinasi dari manusia, alat dan metode yang berinteraksi secara harmonis dalam suatu wadah organisasi yang terstruktur untuk menghasilkan informasi akuntansi keuangan dan informasi manajemen yang terstruktur dan berkualitas.

Sistem informasi berhubungan dengan struktur kewenangan formal dan peran pengendalian, struktur kewenangan formal berhubungan dengan dua hal yaitu, penggunaan sistem informasi akuntansi dengan tujuan untuk pengendalian perilaku bawahan (peran pengendalian) dan penggunaan sistem informasi akuntansi untuk memudahkan pengambilan keputusan (peran manajemen keputusan) pada tingkat sub unit.

Unsur-unsur sistem informasi akuntansi seperti sumber daya manusia, alat, data, dan informasi merupakan faktor penentu dalam meningkatkan efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi dalam pemerintahan daerah. Keberhasilan pelaksanaan sistem informasi akuntansi dapat didefinisikan sebagai keuntungan yang seharusnya menjadi perhatian bagi organisasi, secara luas digunakan oleh satu atau lebih pengguna, dan meningkatkan kualitas kinerja mereka.

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang kurang maksimal dapat menyebabkan laporan keuangan kurang maksimal sehingga para pengguna tidak mendapat informasi yang bermanfaat (Hanafi, 2017). Agar menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna, maka laporan keuangan harus disusun oleh pegawai dengan sumber daya yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi. Selain memiliki pemahaman terhadap SAP dan memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, pegawai bidang keuangan harus mampu menjalankan sistem terkomputerisasi demi menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

2.1.4 Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Sedangkan Mulyadi (2016), menyebutkan bahwa sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian

dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah adalah proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Pada tingkatan organisasi, tujuan pengendalian internal berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan operasional dan strategis, serta kepatuhan pada hukum dan regulasi. Berdasarkan tujuan tersebut, maka sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- 1) Pengendalian internal akuntansi dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan organisasi dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Sebagai contoh, adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi.
- 2) Pengendalian internal administratif dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Contohnya adalah adanya pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan.

Dalam menunjang pencapaian tujuan, pengendalian internal memerlukan komponen pengendalian internal. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa terdapat beberapa unsur dalam sistem pengendalian intern pemerintah yaitu sebagai berikut :

1) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pengawas harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

2) Penilaian Risiko

Pengendalian internal harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.

3) Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

4) Informasi dan Komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang telah ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawab.

5) Pemantauan

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya dapat segera ditindak lanjuti.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan mengenai keandalan suatu laporan keuangan sehingga dapat dipercaya oleh pengguna laporan keuangan bahwa laporan tersebut telah dirancang sesuai dengan standar yang berlaku.

2.1.5 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, dan kemampuan. Menurut Wibowo (2017) menyebutkan bahwa kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.

Menurut Nawawi (2016) sumber daya manusia yaitu manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, tenaga kerja, dan lain-lain. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia (SDM) adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai baik itu berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga pegawai tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

Kompetensi SDM mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*). Kompetensi sumber daya manusia dapat juga diartikan sebagai kemampuan dasar dan kualitas kerja yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan dengan baik. Kompetensi sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas demi keberhasilan organisasinya.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, OPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, SDM yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik.

2.1.6 Komitmen Organisasi

Menurut Greenberg dan Baron (2003) komitmen organisasi berkaitan dengan tingkat keterlibatan orang dalam organisasi dimana mereka bekerja untuk tetap tinggal dalam organisasi tersebut. Sumber daya manusia organisasi merasakan bahwa organisasi dimana mereka bekerja adalah organisasi yang peduli kepada mereka dan menjadi tempat yang terbaik untuk bekerja. Keadaan ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia mempunyai komitmen pada organisasi (Wibowo, 2017:213).

Dalam lingkup lingkungan Pemerintah Daerah, sumber daya manusia atau pegawai yang memiliki komitmen sangat diperlukan untuk mengoptimalkan seluruh informasi yang dimiliki untuk membuat dan menghasilkan laporan keuangan berkualitas. Selain itu, lembaga pemerintah yang memiliki komitmen dalam penyajian laporan keuangannya akan selalu berupaya untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan aturan dan pedoman yang berlaku serta memiliki informasi yang berkualitas.

Pegawai yang memiliki komitmen tinggi pada suatu organisasi dan keinginan yang kuat akan melakukan usaha yang maksimal untuk mencapai tujuan organisasi. Komitmen organisasi sebagai derajat dimana pegawai percaya dan mau menerima tujuan-tujuan organisasi dan akan tetap tinggal atau tidak akan meninggalkan organisasinya. Dimensi Komitmen Organisasi ada 3 bagian menurut Luthan, et.al dalam Wibowo (2017:215) yaitu :

- 1) *Affective commitment*, yang berkaitan dengan adanya keinginan untuk terikat pada organisasi. Individu menetap dalam organisasi karena keinginan sendiri. Kunci dari komitmen ini (*want to*).
- 2) *Continuance commitment*, adalah suatu komitmen yang didasarkan akan kebutuhan rasional. Dengan kata lain, komitmen ini terbentuk atas dasar untung rugi dipertimbangkan atas apa yang harus dikorbankan bila akan menetap pada suatu organisasi. Kunci dari komitmen ini adalah kebutuhan untuk bertahan (*need to*).
- 3) *Normative commitment*, adalah komitmen yang didasarkan pada norma yang ada dalam diri karyawan, berisi keyakinan individu akan tanggung jawab terhadap organisasi. Ia merasa harus bertahan karena loyalitas.

Kunci dari komitmen ini adalah kewajiban untuk bertahan dalam organisasi (*ought to*).

2.1.7 Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu atau taraf atau derajat. Kualitas secara umum didefinisikan sebagai totalitas fitur dan karakteristik yang melekat atau ditugaskan dari suatu produk, orang, proses, layanan dan/atau sistem yang mendukung kemampuannya untuk menunjukkan bahwa ia memenuhi harapan atau memenuhi kebutuhan, persyaratan, atau spesifikasi yang dinyatakan, (Rahmatika, 2014).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pengertian laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari :

a) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih dalam catatan atas laporan keuangan.

c) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

d) Laporan Operasional

Laporan operasional menyediakan untuk informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya dibandingkan dengan periode sebelumnya.

e) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi, aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu.

f) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan pada tahun sebelumnya.

g) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. Laporan keuangan merupakan rincian dari masing-masing akun transaksi yang saling berhubungan antara akun yang satu dengan yang lain.

Menurut Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Menurut Yadiati dan Mubarak (2017:32) kualitas pelaporan keuangan adalah kegiatan melaporkan informasi keuangan guna memenuhi kebutuhan pengguna sekaligus memberikan perlindungan kepada pemilik dengan mendasarkan pada karakteristik kualitatif informasi keuangan dan pengungkapan secara penuh dan wajar. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan adalah karakteristik atau cirri khas yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi suatu laporan keuangan agar dapat tercapainya suatu tujuan dan berguna bagi para pemakainya.

Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi dan sebagai wujud pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka dalam mengelola suatu entitas, (Kartahadi, dkk, 2016:126). Tujuan umum laporan

keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Pada dasarnya laporan keuangan pemerintah adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dihasilkan dari dan untuk operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan laporan keuangan pemerintah, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan.

Suatu laporan keuangan dikatakan berkualitas, harus menjadi sebuah laporan keuangan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan dengan memenuhi kriteria laporan keuangan yang dibutuhkan pengguna. Karakteristik kualitatif laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan ukuran normatif yang perlu

diwujudkan dalam penyampaian informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Empat karakteristik kualitatif tersebut diantaranya :

1) Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang disajikan sesuai dengan kebutuhan pihak yang menggunakannya. Karena, dapat mempengaruhi keputusan pihak pengguna khususnya dalam hak evaluasi, memprediksi masa depan, serta menegaskan dan mengoreksi hasil evaluasi dimasa lalu. Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Memiliki manfaat umpan balik
- b. Memiliki manfaat prediktif
- c. Tepat waktu
- d. Lengkap

2) Andal

Informasi yang andal (dapat dipercayakan) dalam laporan keuangan pemerintah meskipun sudah relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensi dapat menyesatkan dan merugikan penggunaan laporan keuangan. Laporan keuangan yang andal memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Penyajian jujur
- b. Dapat diverifikasi
- c. Netralisasi

3) Dapat dibandingkan

Informasi yang temuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan entitas umum lainnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan internal dilakukan bila suatu entitas menerapkan peraturan yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan eksternal dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4) Dapat dipahami

Laporan keuangan yang dapat dipahami jika pihak penggunanya mengerti dengan informasi-informasi yang disajikan dan mampu menginterpretasikannya. Maka dari itu, laporan yang disajikan harus menggunakan standar format penyusunan yang mudah dipahami oleh pihak pengguna.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Untuk memperkaya penelitian, terlebih dahulu peneliti melihat penelitian terdahulu yang sejenis. Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan:

Artana (2016) dengan judul “Pengaruh Pemahaman SAP, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah”. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pemahaman SAP dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Berganda. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel bebas pemahaman SAP dan sistem pengendalian internal serta sama-sama menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Selain itu, persamaan lainnya yaitu penelitian ini sama-sama meneliti tentang kualitas laporan keuangan. Perbedaannya yaitu pada tempat penelitian, waktu penelitian dan salah satu variabel bebasnya, dimana tempat penelitian pada penelitian ini yaitu pada SKPD di wilayah DKI Jakarta dan waktu penelitian ini pada tahun 2016.

Septarini dan Papilaya (2016) mengenai “Interaksi Komitmen Organisasi Terhadap Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Yang mana teknik analisis yang digunakan *Moderated Regression Analysis (MRA)*. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Komitmen organisasi memoderasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Komitmen organisasi tidak memoderasi hubungan antara sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel bebas kompetensi SDM dan SPI. Selain itu, persamaan lainnya yaitu penelitian ini sama-sama meneliti tentang kualitas laporan keuangan. Perbedaannya yaitu pada tempat penelitian dan waktu

penelitian, dimana tempat penelitian pada penelitian ini yaitu pada SKPD di Kabupaten Merauke dan waktu penelitian ini pada tahun 2016. Perbedaan lainnnya penelitian ini menggunakan varibel moderasi yaitu komitmen organisasi, pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis MRA.

Saipullah (2017) dengan judul “Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Dengan Lingkungan Eksternal Sebagai Variabel Moderating” (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Polewali Mandar). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Berganda. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa penggunaan sistem informasi akuntansi, kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Uji nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa variabel lingkungan eksternal tidak mampu memoderasi penggunaan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Uji nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa variabel lingkungan eksternal mampu memoderasi kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel bebas penggunaan SIA dan SPI. Persamaan lainnya yaitu penelitian ini sama-sama meneliti tentang kualitas laporan keuangan. Perbedaannya yaitu teknik analisis, tempat penelitian dan waktu penelitian, dimana teknik analisis yang digunakan Analisis Regresi Moderasi dengan Pendekatan Selisih Muthlak, tempat penelitian pada

penelitian ini yaitu pada SKPD Kabupaten Polewali Mandar dan waktu penelitian ini pada tahun 2017.

Hanaffi (2017) berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati). Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah, peran audit internal dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Berganda. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel bebas pemahaman SAP dan kompetensi SDM serta sama-sama menggunakan teknik Analisis Regresi Linier Berganda. Selain itu, persamaan lainnya yaitu penelitian ini sama-sama meneliti tentang kualitas laporan keuangan. Perbedaannya yaitu pada tempat penelitian dan waktu penelitian, dimana tempat penelitian pada penelitian ini yaitu pada SKPD Kabupaten Pati dan waktu penelitian ini pada tahun 2017.

Siwambudi, dkk (2017) berjudul “Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kompetensi SDM dan Sistem Pengendalian Intern pada Kualitas Laporan Keuangan”. Penelitian ini menggunakan teknik analisis *Moderated Regression Analysis (MRA)*. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klungkung. Sistem

pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klungkung. Interaksi komitmen organisasi dengan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung. Interaksi komitmen organisasi dengan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel bebas kompetensi SDM dan sistem pengendalian intern. Selain itu, persamaan lainnya yaitu penelitian ini sama-sama meneliti tentang kualitas laporan keuangan. Perbedaannya yaitu pada tempat penelitian dan waktu penelitian, dimana tempat penelitian pada penelitian ini yaitu pada SKPD Pemerintah Kabupaten Klungkung dan waktu penelitian ini pada tahun 2017. Perbedaan lainnya yaitu penggunaan variabel moderasi yaitu komitmen organisasi dan teknik analisisnya.

Ariyani (2018) mengenai “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah” (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Salatiga). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan penerapan standar akuntansi pemerintah dan penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan

keuangan. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel bebas penerapan SIA, kompetensi SDM dan SPI serta sama-sama menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Persamaan lainnya yaitu penelitian ini sama-sama meneliti tentang kualitas laporan keuangan. Perbedaannya yaitu pada tempat penelitian, waktu penelitian, dimana tempat penelitian pada penelitian ini yaitu pada OPD Kota Salatiga, waktu penelitian ini yaitu pada tahun 2018.

Sihasale (2018) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderasi” (Studi Empiris pada SKPD BPKAD Kabupaten Malang). Penelitian ini menggunakan teknik analisis *Moderated Regression Analysis (MRA)*. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pemahaman SAP berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan SIA berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya kompetensi SDM memoderasi (memperkuat) hubungan antara pemahaman SAP dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan kompetensi SDM juga memoderasi (memperkuat) hubungan antara pemanfaatan SIA dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel bebas pemahaman SAP dan pemanfaatan SIA. Selain itu, persamaan lainnya yaitu penelitian ini sama-sama meneliti tentang kualitas laporan keuangan. Perbedaannya yaitu pada tempat penelitian dan waktu penelitian, dimana tempat penelitian pada penelitian ini yaitu pada

SKPD BPKAD Kabupaten Malang dan waktu penelitian ini pada tahun 2018. Perbedaan lainnya penelitian ini menggunakan variabel moderasi yaitu kompetensi SDM, pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis MRA.

Yaqin dan Jatmiko (2018) berjudul “Kontribusi Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah : Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Dalam penelitian teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Berganda. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel bebas kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal. Selain itu, persamaan lainnya yaitu penelitian ini sama-sama meneliti tentang kualitas laporan keuangan. Perbedaannya yaitu pada tempat penelitian dan waktu penelitian, dimana tempat penelitian pada penelitian ini yaitu pada SKPD Kabupaten Biak Numfor dan waktu penelitian ini pada tahun 2018.

Nuraini (2019) mengenai “Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan” (Studi Empiris pada OPD Kota Magelang). Teknik analisis yang digunakan oleh peneliti adalah teknik Analisa Regresi Linier Sederhana. Hasil dari

penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel bebas komitmen organisasi, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern serta sama-sama menggunakan teknik Analisis Regresi Linier Berganda. Selain itu, persamaan lainnya yaitu penelitian ini sama-sama meneliti tentang kualitas laporan keuangan. Perbedaannya yaitu pada tempat penelitian, dan waktu penelitian, dimana tempat penelitian pada penelitian ini yaitu pada OPD Kota Magelang dan waktu penelitian ini pada tahun 2019.

Hernanda dan Setiyawati (2020) mengenai “Pengaruh Komitmen Organisasi, Pelaksanaan Anggaran Dan Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan” (Survei Pada Pemerintah Daerah Kota Bogor). Teknik analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu komitmen organisasi tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan, sedangkan pelaksanaan anggaran dan implementasi SIA berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel komitmen organisasi serta sama-sama menggunakan teknik Analisis Regresi Linier Berganda. Perbedaannya yaitu pada tempat penelitian dan waktu penelitian, dimana tempat penelitian pada penelitian

ini yaitu pada Pemerintah Daerah Kota Bogor dan waktu penelitian ini pada tahun 2020.

Yanti (2020) mengenai “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” (Studi Empiris pada OPD Kota Malang). Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu Analisis Regresi Linier Berganda. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa standar akuntansi pemerintah dan pengawasan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas. Sedangkan pemanfaatan sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel pemanfaatan SIA serta sama-sama menggunakan teknik Analisis Regresi Linier Berganda. Selain itu, persamaan lainnya yaitu penelitian ini sama-sama meneliti tentang kualitas laporan keuangan. Perbedaannya yaitu pada tempat penelitian dan waktu penelitian, dimana tempat penelitian ini yaitu pada OPD Kota Malang dan waktu penelitiannya yaitu pada tahun 2020.

Rohman, dkk (2020) berjudul “Peran Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Serang”. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah

daerah. Standar akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel bebas SAP, pengendalian intern dan komitmen organisasi serta sama-sama menggunakan teknik Analisis Regresi Linier Berganda. Selain itu, persamaan lainnya yaitu penelitian ini sama-sama meneliti tentang kualitas laporan keuangan. Perbedaannya yaitu pada tempat penelitian dan waktu penelitian, dimana tempat penelitian pada penelitian ini yaitu pada Pemerintah Daerah Kota Serang dan waktu penelitian ini pada tahun 2020.

Puspita, dkk (2020) berjudul “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Seluma”. Penelitian ini menggunakan teknik Analisis Regresi Linier Berganda. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pemahaman standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel bebas pemahaman SAP dan sistem pengendalian intern. Selain itu, persamaan lainnya yaitu penelitian ini sama-sama meneliti tentang kualitas laporan keuangan. Perbedaannya yaitu pada tempat

penelitian dan waktu penelitian, dimana tempat penelitian pada penelitian ini yaitu pada Kabupaten Seluma dan waktu penelitian ini pada tahun 2020.

